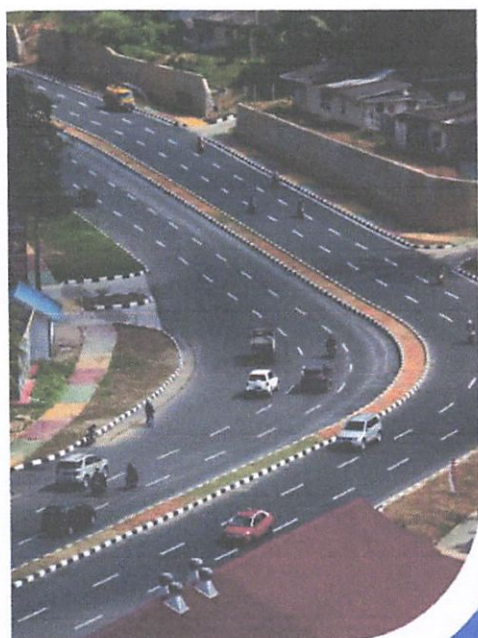


RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1438

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah mempunyai suatu pedoman pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi demi kelancaran pembangunan kota Batam serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk jangka waktu satu tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengingat pentingnya peranan Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat daerah (OPD), yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan secara efektif dan efisien terhadap situasi dan kondisi yang ada, maka proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Batam, 18 Juli 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



RAJA AZMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP 19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renja.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja.....	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan.....	3
1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja.....	5
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	15
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	15
2.3.3 Peluang dan Tantangan.....	16
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 28

3.3 Program dan Kegiatan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 37

BAB V PENUTUP..... 42

5.1 Catatan Penting..... 42

5.2 Kaidah Pelaksanaan..... 43

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 / T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Batam.....	8
Tabel 2.2 / T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.....	13
Tabel 2.3 / T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam....	18
Tabel 3.1 / T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	32
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja Pembangunan adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Batam yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”, Bapenda Kota Batam yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan

unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan; dan

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran Bapenda

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam di tahun 2025;

2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.1.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan
- 2.3.3 Peluang dan Tantangan
- 2.3.4 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Dalam RKPD Tahun 2025
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA** **PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

TABEL 2.1 (T-C. 29)
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
 KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan daerah Kota Batam

Ko de Re ken ing	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Bidang Urusan: Keuangan									
5.0 2.0 1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.146.633.372	54.412.345.659	33.886.573.456	32.620.278.877		38.648.072.053	125.680.696.589	56,83

Ko de Re ken ing	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2. 02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	160.713.840.484	44.368.038.122	23.453.705.831	23.303.791.793	99,36%	31.894.306.374	99.566.136.289	61,95
5.0 2.0 1.2. 05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	790.396.730	-	303.792.000	189.217.293	62,29%	138.670.415	327.887.708	41,48
5.0 2.0 1.2. 06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.093.907.955	2.693.784.601	1.720.812.825	1.305.625.523	75,87%	1.331.928.000	5.331.338.124	35,32
5.0 2.0 1.2. 07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	10.669.074.761	175.960.000	2.131.832.200	1.903.040.000	89,27%	63.461.000	2.142.461.000	20,08
5.0 2.0 1.2.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	28.624.953.239	5.992.470.586	5.408.901.600	5.174.873.368	95,67%	4.305.256.264	15.472.600.218	54,05

Ko de Re ken ing	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi								
5.0 2.0 1.2. 09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	5.254.460.181	1.182.092.350	867.529.000	447.343.700	43,91%	914.450.000	2.543.886.050	48,41
5.0 2.0 1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	53.134.366.217	9.896.214.486	5.001.364.500	3.864.211.611	49,19%	7.091.866.300	19.991.492.441	37,62
5.0 2.0 4.2. 01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	53.134.366.217	9.896.214.486	5.001.364.500	3.864.211.611	77,26%	7.091.866.300	20.852.292.397	3739,24
JUMLAH			274.280.999.569	64.308.560.145	38.887.937.956	36.484.490.488	93,82%	45.739.938.353	146.532.988.986	53,42

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2.2 (T-C. 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	1. Realisasi Pajak Daerah			1.351.604.000.000	1.415.400.000.000	1.482.211.000.000	1.552.173.000.000	1.225.620.243.339				

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	2. Realisasi Retribusi Daerah			193.469.263.000	202.601.013.000	212.163.781.000	222.177.912.000	139.775.438.951				
	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah			5%	5%	5%	5%	8,88%		5%	5%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang urusan keuangan, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dari tugas dan fungsi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra terkait angka Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menjalankan fungsinya, adalah:

1. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur untuk mendukung tugas dan fungsi Bapenda Kota Batam masih perlu ditingkatkan;
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kesadaran membayar pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah transaksi pembayaran yang belum optimal;
3. Perlunya penyempurnaan regulasi terkait pajak dan retribusi daerah;
4. Perlunya peningkatan penerapan mekanisme kerja dan SOP;
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kota Batam;
6. Perlunya peningkatan penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum dilaksanakan secara tegas, sehingga dapat meningkatkan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah;
7. Koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah masih perlu ditingkatkan.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ini juga turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang disebabkan semakin gencarnya pembangunan dan pengembangan di bidang infrastruktur, pariwisata, perumahan dan sektor-sektor lainnya sehingga hal tersebut memberikan sumbangsih terhadap kenaikan target pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mendapati beberapa tantangan dalam hal koordinasi horizontal antar OPD Penghasil. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mempunyai tantangan yang lain dengan bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pembayaran pajak serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang penting untuk mendapatkan perhatian besar dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila suatu kondisi tidak diantisipasi akan menimbulkan hambatan dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis Bapenda Kota Batam

Isu strategis yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah perlunya peningkatan pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut, diantaranya dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur serta pelayanan publik yang lebih baik yang didukung dengan kebijakan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai badan yang bertugas sebagai perencana peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) demi tata kelola pemerintahan yang baik.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.3 (T-C.31)
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	41.243.018.027	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	43.317.870.661	
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	29.231.343.193	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	33.697.888.941	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/Bulan	29.120.603.210	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/Bulan	33.697.888.941	ASN bertambah dari optimalisasi PPPK
2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27 Dokumen	110.739.983	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	Semua komponen belanja dipindahkan ke sub kegiatan yang lain

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	411.821.487	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	307.998.500	
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	167.053.887	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.300.000	
2	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	244.767.600	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	291.698.500	Adanya penambahan bimtek juru sita
3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	2.839.294.390	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	2.248.567.500	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.381.847	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.873.000	Adanya kenaikan harga disertai dengan peningkatan jumlah kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	1.452.594.979	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	1.167.213.000	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	127.794.058	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	87.132.500	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.377.400	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.250.000	
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.010.576	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000	
6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	1.205.135.530	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	937.899.000	
4	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	1.991.304.585	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100%	1.913.929.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			pemerintah yang terlaksana								
1						Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	634.866.000	
2	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1.859.121.180	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	1.225.231.000	Pengadaan kendaraan diganti dengan kendaraan operasional pendukung SIBIJAK
3	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	132.183.405	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	53.812.000	
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100%	5.838.698.836	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100%	4.190.826.720	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	500.610.934	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	594.900.000	Penambahan bandwidth guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	193.588.920	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	312.000.000	Penambahan sewa gedung untuk gudang arsip
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.144.498.982	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.283.926.720	Pengurangan jumlah Tenaga Kontrak karena terserap menjadi PPPK
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	930.555.536	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	958.660.000	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	492.454.917	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	641.710.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit	349.134.599	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	286 Unit	315.450.000	
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	88.966.020	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000	
II	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	1.48 T 212 M	11.436.015.134	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	1.48 T 212 M	6.361.162.500	
1	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5% WP Daerah	11.436.015.134	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5% WP Daerah	6.361.162.500	
1	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	543.349.702	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	422.146.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	1.653.644.382	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	724.921.000	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	600 Unit	5.400.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	600 Unit	1.600.000.000	
4	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.312.199.540	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.300.015.000	Adanya penambahan sejumlah belanja akibat penerapan kebijakan terbaru
5	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	1.254.262.095	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	1.429.500.000	Adanya penambahan Tenaga Kontrak Programmer Senior untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi PBB dan BPHTB

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
6	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	445.150.858	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	91.920.000	
7	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	15.000 Dokumen	211.067.918	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	254.590.500	
8	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9.500 Dokumen	306.345.630	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8.000 Dokumen	185.800.000	
9	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	650 Dokumen	309.995.009	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	352.270.000	Adanya penambahan sejumlah belanja akibat penerapan kebijakan terbaru
TOTAL					52.679.033.161	TOTAL				49.679.033.161	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan maupun tingkat Kota, Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan program yang diperlukan untuk dijalankan oleh OPD guna kesejahteraan masyarakat. Usulan masyarakat yang telah disetujui akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja masing-masing OPD sesuai dengan bidang urusannya. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tidak mendapatkan usulan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan keuangan khususnya pada pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Badan Pendapatan Daerah Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Batam Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam, yaitu: ***“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”***.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah dirumuskan pada misi ke lima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian pesat, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah mencanangkan tujuan dan sasaran organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan tujuan dan sasaran tersebut, merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan

dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan.

A. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yakni meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Tujuan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Walikota Batam Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Sasaran yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yaitu meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Demi mencapai sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terus berinovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta terus mengembangkan sistem informasi guna meningkatkan pendapatan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 dan capaian Renstra, analisis

kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2023.

Selain pertimbangan di atas, program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 pada dasarnya telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Secara garis besar, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif

Adapun jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD tahun anggaran 2025, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Hasil Pengerjaan Tabel T-C.33

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tabel T-C.33 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA BATAM

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Urusan : Penunjang Urusan Pemerintah								
5.02.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	43.317.870.661	APBD		100%	46.104.962.131
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	33.697.888.941	APBD		100%	35.734.410.811
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	131 Orang/ Bulan	33.697.888.941	DAU, APBD	ASN bertambah dari optimalisasi PPPK	131 Orang/ Bulan	35.734.410.811
5.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	-	-	APBD	Semua komponen belanja dipindahkan ke sub kegiatan yang lain	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	307.998.500	APBD		100%	570.074.000
5.02.01.2.05.02	Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	1 Paket	16.300.000	APBD		1 Paket	166.409.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Kota Batam	48 Orang	291.698.500	APBD	Adanya penambahan bimtek juru sita	60 Orang	403.665.000
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	2.248.567.500	APBD		100%	2.645.361.000
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	19.873.000	APBD	Adanya kenaikan harga disertai dengan peningkatan jumlah kebutuhan	1 Paket	21.512.000
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	5 Paket	1.167.213.000	APBD		10 Paket	1.161.550.000
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Batam	3 Paket	87.132.500	APBD		3 Paket	153.208.000
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	29.250.000	APBD		1 Paket	29.767.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Batam	1 Dokumen	7.200.000	APBD		1 Dokumen	5.670.000
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	937.899.000	APBD		12 Laporan	1.273.654.000
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	1.913.929.000	APBD		100%	1.930.266.000
5.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Batam	1 Unit	634.866.000	APBD		-	-
5.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Batam	3 Unit	1.225.231.000	APBD	Pengadaan kendaraan diganti dengan kendaraan operasional pendukung SIBIJAK	3 Unit	1.756.080.000
5.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Batam	19 Unit	53.812.000	APBD		39 Unit	174.186.000
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	4.190.826.720	APBD		100%	4.223.845.320

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	594.900.000	APBD	Penambahan bandwidth guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat	12 Laporan	624.645.000
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	312.000.000	APBD	Penambahan sewa gedung untuk gudang arsip	12 Laporan	327.600.000
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	3.283.926.720	APBD	Pengurangan jumlah Tenaga Kontrak karena terserap menjadi PPPK	12 Laporan	3.271.600.320
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	958.660.000	APBD		100%	1.001.080.000
5.02.01.2.09.010	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Batam	24 Unit	641.710.000	APBD		27 Unit	674.646.000
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	286 Unit	315.450.000	APBD		290 Unit	324.859.000
5.02.01.2.09.010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kota Batam	1 Unit	1.500.000	APBD		1 Unit	1.500.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
5.02.01	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	Kota Batam	1.482.211.000.000 212.163.781.000	6.361.162.500	APBD		1.552.173.000.000 222.177.912.000	10.184.858.000
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	Kota Batam	5% WP Daerah	6.361.162.500	APBD		5% WP Daerah	10.184.858.000
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	1 Dokumen	422.146.000	APBD		1 Dokumen	153.406.000
5.02.04.2.01.03	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	5 Laporan	724.921.000	APBD		5 Laporan	1.733.078.000
5.02.04.2.01.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	600 Unit	1.600.000.000	APBD		800 Unit	4.000.000.000
5.02.04.2.01.05	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Batam	12 Laporan	1.300.015.000	APBD	Adanya penambahan sejumlah belanja akibat penerapan kebijakan terbaru	12 Laporan	1.682.701.000
5.02.04.2.01.06	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan	Kota Batam	30 Laporan	1.429.500.000	APBD	Adanya penambahan Tenaga	30 Laporan	1.498.875.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Pajak Daerah	Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					Kontrak Programmer Senior untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi PBB dan BPHTB		
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	295 Layanan	91.920.000	APBD		295 Layanan	74.000.000
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Batam	12 Dokumen	254.590.500	APBD		12 Dokumen	246.172.000
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	8.000 Dokumen	185.800.000	APBD		8.000 Dokumen	195.000.000
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	12 Dokumen	352.270.000	APBD	Adanya penambahan sejumlah belanja akibat penerapan kebijakan terbaru	12 Dokumen	601.626.000
TOTAL					49.679.033.161				56.289.820.131

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 telah disesuaikan dengan kebutuhan OPD. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasinya tergantung pada beberapa faktor misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan tujuan dan sasaran, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dengan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan tabel dibawah ini :

TABEL 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					BADAN PENDAPATAN DAERAH						49.679.033.161,00							56.924.706.131,00			
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						49.679.033.161,00							56.924.706.131,00			
	5	02			KEUANGAN						49.679.033.161,00							56.924.706.131,00			
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %			100 %	43.317.870.661,00						100 %	46.739.848.131,00			
	5	02	01	2.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administarsi keuangan perangkat daerah yang terpenuhinya	-			100 %	33.697.888.941,00			-	-	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	-	35.734.410.811,00			
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				131 Orang/bulan	33.697.888.941,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		35.734.410.811,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.05	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administarsi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	-			100 %	307.998.500,00			-	-	-	-	570.074.000,00			
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	16.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.409.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	291.698.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		403.665.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administarsi umum perangkat daerah	-			100 %	2.248.567.500,00			-	-	-	-	2.645.361.000,00			
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.873.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.512.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.167.213.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.161.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	87.132.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.767.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.670.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	937.899.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.273.654.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	-			100 %	1.913.929.000,00			-	-	-	-	2.565.152.000,00	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	634.886.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		634.886.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.225.231.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.756.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	53.812.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		174.186.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-			100 %	4.190.826.720,00			-	-	-	-	4.223.845.320,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	594.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		624.645.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	312.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		327.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.283.926.720,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.271.600.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	-			100 %	958.660.000,00			-	-	-	-	1.001.005.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					24 Unit	641.710.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		674.646.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					286 Unit	315.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		324.859.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara														
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Pajak Daerah Realisasi Retribusi Daerah	1.55Milyar 1.55Trilyun 1,55Trilyun 222Milyar			1,48 Trilyun 212 Milyar	6.361.162.500,00						1.48Milyar 1.55Trilyun 1,55Trilyun 222Milyar	10.184.858.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	-			5 %	6.361.162.500,00			-	-	Wajib Pajak Daerah	-	10.184.858.000,00	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					1 Dokumen	422.146.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		153.406.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah														
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					5 Laporan	724.921.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		1.733.078.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					600 Unit	1.600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		4.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					12 Laporan	1.300.015.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		1.682.701.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah														
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					30 Laporan	1.429.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		1.498.875.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					295 Layanan	91.920.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		74.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					12 Dokumen	254.590.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		246.172.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					8000 Dokumen	185.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		195.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					12 Dokumen	352.270.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Daerah		601.626.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H											49.679.033.161,00							56.924.706.131,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan yang membidangi urusan keuangan khususnya pada pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah diantaranya belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam hal pengawasan dan pengendalian realisasi penerimaan daerah, basis data Wajib Pajak yang belum terbarukan, penegakan sanksi yang belum tegas, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya serta belum optimalnya penyaluran informasi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbaru perlu untuk segera diselesaikan.

Langkah-langkah strategis perlu untuk terus ditingkatkan keefektifannya guna mencapai kemandirian perekonomian melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci utama agar dapat melakukan pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025, disampaikan bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja ini, maka:

1. Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja OPD yaitu mencapai target realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Selain dari proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam perlu untuk mendapat respon. Seperti kasus Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, untuk itu perlu lebih digiatkan lagi penyelenggaraan penyuluhan kebijakan Pajak Daerah yang terbaru dengan menghadirkan Wajib Pajak. Tantangan lain yang dihadapi ketika Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak tidak dengan tarif yang seharusnya, maka perlu dilakukan dan digencarkan kegiatan updating data dengan menerjunkan petugas ke lapangan.

Menyederhanakan proses pembayaran dengan pemanfaatan teknologi juga dapat mempengaruhi kesadaran taat pajak, untuk itu Badan Pendapatan Daerah melakukan kerjasama lintas sektor seperti Bank dan sejumlah *marketplace* untuk dijadikan mitra pembayaran Pajak Daerah. Melakukan layanan jemput bola dengan melakukan *Roadshow* PBB-P2 dan menggerakkan layanan Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (SIBIJAK) sampai lokasi pemukiman juga dinilai cukup efektif untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah melakukan proses penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak dengan memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan, dan proses penindakan yang dilakukan secara tegas.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Pemerintah Kota/Kabupaten akan menerima pembagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui pola opsen atau disebut Pajak Opsen PKB dan BBN KB*. Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah Kota sesuai Pasal 112 PP 35/2023 melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam hal pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBN KB, Opsen BBN KB, Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Ketentuan lebih detail terkait sinergi pendanaan/*cost sharing* akan dibahas oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan disepakati baik mengenai berapa besaran persentase yang wajib dianggarkan oleh kabupaten/kota dihitung dari besaran penerimaan yang menjadi hak kabupaten/kota juga akan disepakati jenis belanja yang diperbolehkan menjadi bagian dari belanja wajib/*mandatory spending*, dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dan diperkuat oleh suatu produk hukum berupa Peraturan Gubernur.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun agar menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI